



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ I288/KPTS/408.I2/2017**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Pengeluaran;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 1. Menyusun RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 7. Menandatangani SPM;
 8. Menandatangani pengesahan SPJ;
 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;

2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
9. Menandatangani SPP;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1288/KPTS/408.12/2017
TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
I	2	3	4
1	Ir. Heru Wiwoho, SP.MSi NIP. 196707161992021002	Kepala	Pengguna Anggaran
2	Purnomo, S.Sos.MM NIP. 196205201983021004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan: 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah 4. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5. Pengelolaan informasi pembangunan dan profil daerah 6. Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3	Basuki Rachmad, SP.MSc NIP. 196805271996021002	Kepala Bidang Analisis Data, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan: 1. Penyusunan rancangan RKPD 2. Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah 3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan panggaran pembangunan daerah 5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 6. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan

1	2	3	4
4	Sugiyem AP. MSi NIP. 197408081993112001	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 2. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 4. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial budaya 5. Penyusunan database perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 6. Koordinasi, fasilitasi dan penyusunan kerangka regulasi pcnanggulangan kemiskinan 7. Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya
5	Cicik Roudlotul Jannah, ST.MM NIP. 197404081998032008	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi perencanaan fisik dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh 2. Penyusunan indikator ekonomi daerah 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi 6. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi 7. Penyusunan database perencanaan pembangunan bidang ekonomi 8. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 9. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan insfrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 11. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam

1	2	3	4
			12. Penyusunan database perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam 13. Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah
6	Iswahyudi Cahyo Purnomo, AMd NIP. 197601162000121001	Bendaharan Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
7	Erna Irawati, ST. MM NIP. 197311121993082001	Pengadministrasi Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah 4. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5. Pengelolaan informasi pembangunan dan profil daerah 6. Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
8	Gunawan NIP. 19690815 19932 1003	Penyiap Bahan Pengendalian Pembangunan, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Penyusunan rancangan RKPD 2. Pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah 3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 5. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 6. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan
9	Sulasmi, SE NIP. 196506191991032007	Kasubbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat I	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 2. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1	2	3	4
10	Aziz Bahtiar Rifa'i, ST NIP. 198003212009031003	Pengumpul Bahan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor I	<p>4. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang sosial dan budaya</p> <p>5. Penyusunan database perencanaan pembangunan bidang sosial budaya</p> <p>6. Koordinasi, fasilitasi dan penyusunan kerangka regulasi pcnanggulangan kemiskinan</p> <p>7. Penyusunan indikator daerah di bidang sosial budaya</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan:</p> <p>1. Fasilitasi perencanaan fisik dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>3. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan insfrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>5. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>6. Penyusunan database perencanaan pembangunan infrastruktur, prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>7. Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah</p>
11	Try Liyani NIP. 198509112010012001	Pengumpul Bahan Ekonomi, SDA dan Infrastruktur II	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan:</p> <p>1. Penyusunan indikator ekonomi daerah</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</p> <p>3. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi</p> <p>4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi</p>

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">5. Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi6. Penyusunan database perencanaan pembangunan bidang ekonomi

BUPATI PACITAN



INDARTATO